

**GAMBARAN SINGKAT PERKEMBANGAN TERKINI AFRIKA SELATAN
DAN
HUBUNGAN BILATERAL RI – AFRIKA SELATAN**





DAFTAR ISI

- I. Profil negara
- II. Hubungan bilateral RI-Afsel
- III. Gambaran umum hubungan bilateral RI-Afsel
- IV. Perbandingan Afsel-RI
- V. Perkembangan terkini Afsel
- Kebijakan luar negeri
- Politik
- Ekonomi
- Sosial budaya
- VI. Kerja sama politik
- VII. Kerja sama ekonomi
- VIII. Kerja sama sosial budaya

I. PROFIL NEGARA

Negara	:	Republic of South Africa/Republik Afrika Selatan
Ibu kota	:	Pretoria (Administratif/Eksekutif), Cape Town (Legislatif), Bloemfontein (Yudikatif)
Hari Nasional	:	27 April
Kepala Negara/Pemerintahan	:	Presiden Jacob Gedleyihlekisa Zuma (sejak 9 Mei 2009)
Menteri Luar Negeri	:	Maite Nkoana-Mashabane (sejak 11 Mei 2009)
Duta Besar Indonesia di Pretoria	:	Suprpto Martosetomo (sejak Mei 2014)
Duta Besar Afsel di Jakarta	:	Pakamisa Augustine Sifuba (sejak 30 Januari 2015)
Bahasa Nasional	:	Inggris, IsiXhosa, IsiZulu, Afrikaans, Ndebele, Sotho Utara, Sotho, Swazi, Tsonga, Venda dan Setswana
Agama	:	Protestan (36,6%), Katolik (7,1%), Muslim (1,5%), lain-lain (2,3%)
Luas Wilayah	:	Darat: 1.214.470 Km ² Perairan: 4.620 Km ²
Penduduk	:	54,95 juta jiwa (2015, World Bank)
GDP	:	USD 312,79 milyar (2015, World Bank); USD 350,1 Milyar (2014)
<i>Income per kapita</i>	:	USD 5.691,7 (2015, World Bank)
Pertumbuhan GDP	:	1,3% (2015, World Bank)
Cadangan Devisa	:	USD 41,62 milyar (2015, World Bank)
Industri Unggulan	:	Platinum, emas dan <i>chrominium</i> (terbesar di dunia), besi dan baja, kimia, pupuk, dan produk makanan
Komoditas Ekspor	:	Emas, berlian, platinum, bahan tambang, mesin-mesin
Negara Mitra Utama Ekspor	:	RRT, AS, Jepang, Botswana dan Jerman
Komoditas Impor	:	Bahan kimia, produk migas, alat-alat iptek, bahan pangan
Negara Mitra Utama Impor	:	RRT, Jerman, Arab Saudi, AS, Nigeria dan India

II. HUBUNGAN BILATERAL RI-AFRIKA SELATAN

Hubungan Diplomatik	:	Sejak 12 Agustus 1994 (22 tahun)	
Data Perdagangan RI – Afsel (Menurut Kemdag RI)	:	<p><u>Volume Perdagangan RI-Afsel</u> <u>Tahun 2015</u> USD 898 juta</p> <p><u>Tahun 2016 (Jan-Okt)</u> USD 860.4 juta</p> <p><u>Ekspor RI ke Afsel</u> <u>Tahun 2015</u> USD 666,12 juta</p> <p><u>Tahun 2016 (Jan-Okt)</u> USD 632.4 juta</p> <p><u>Impor RI dari Afsel</u> <u>Tahun 2015</u> USD 231,94 juta</p> <p><u>Tahun 2016 (Jan-Okt)</u> USD 228 juta</p> <p><u>Neraca Perdagangan RI-Afsel</u> <u>Tahun 2015</u> Surplus USD 434,18 juta</p> <p><u>Tahun 2016 (Jan-Okt)</u> Surplus USD 404.4 juta</p>	<p><u>2014</u> USD 1,87 milyar</p> <p><u>2014</u> USD 1,379milyar</p> <p><u>2014</u> USD 488,49 juta</p> <p><u>2014</u> Surplus USD 881,01 juta</p>
Investasi Indonesia ke Afsel	:	n/a	
Investasi Afsel di Indonesia	:	USD 1,8 juta (BKPM, 2015)	
Ekspor Utama RI ke Afsel (Kemdag RI)	:	Kendaraan bermotor, karet, alas kaki, ban dan kertas	
Impor Utama RI dari Afsel (Kemdag RI)	:	Bubur kayu (<i>pulp</i>), gula, alumunium, besi, baja, kapas, dan mesin-mesin	
Jumlah WNI di Afsel	:	242 orang (KBRI Pretoria: Januari 2016)	

III. GAMBARAN UMUM HUBUNGAN BILATERAL RI – AFRIKA SELATAN

1. Hubungan diplomatik RI-Afsel dibuka oleh Wakil Tetap (Watap) RI dan Watap Afsel di New York dengan ditandatanganinya *Joint Communique* Pembukaan Hubungan Diplomatik pada tanggal 12 Agustus 1994. Sebelum itu, Indonesia dan Afsel telah menyetujui pembukaan hubungan konsuler yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Februari 1994. Sejak 12 Agustus 1994, LORI – *Liaison Office of the Republic of Indonesia* di Pretoria telah berubah statusnya menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Sementara pemerintah Afsel secara resmi membuka kantor perwakilannya di Jakarta pada 17 Januari 1995.
2. Hubungan bilateral RI-Afsel berlangsung dengan baik, yang antara lain, ditandai dengan saling kunjung antar pejabat tinggi negara dan kerja sama dalam kerangka multilateral, terutama PBB, GNB dan G20.
3. Pemerintah Afsel memandang Indonesia sebagai bangsa yang memiliki ikatan sejarah yang erat dengan bangsa Afsel. Pemerintah Afsel juga senantiasa mengingat dan sangat menghargai peranan Pemerintah Indonesia yang di masa lalu secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Afsel menentang pemerintah Apartheid. Hal ini ditandai dengan kehadiran wakil dari *African National Congress* (ANC), Mosen Kotane dan Moulvi Cachalia, sebagai *observer* pada KTT Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung.
4. Nelson Mandela sebagai tokoh ANC dan Presiden pertama Afrika Selatan pasca-Apartheid (1994-1999) mempunyai *special attachment* pada Indonesia. Mandela telah berkunjung ke Indonesia sebanyak empat kali (1990, 1994, 1997 dan 2002). Mandela juga dikenal sebagai tokoh dunia yang secara tidak langsung memperkenalkan batik yang terkenal dengan sebutan *Madiba Shirt* di Afrika Selatan.

A. Mekanisme bilateral

1. Indonesia dan Afsel memiliki mekanisme konsultasi bilateral berupa Sidang Komisi Bersama (SKB), *Joint Trade Committee* (JTC) dan telah menandatangani sejumlah Perjanjian dan MoU di berbagai bidang: i) Pembentukan SKB; ii). Pembentukan *Joint Trade Committee*; iii). Perdagangan; iv). Pertanian; v). Pertahanan; vi). UKM; vii). Budaya; viii). Transaksi keuangan; ix). Perhubungan Udara; x). Perpajakan; xi) Ristek; xii). Pengembangan Kebijakan.
2. SKB ke-1 pada tingkat *Senior Official Meeting* (SOM) diselenggarakan di Batam, Indonesia tanggal 25–26 Februari 2008. Dalam *Draft* Pembaruan MoU Pembentukan SKB RI-Afsel, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan status SKB tersebut dari Tingkat SOM menjadi Tingkat Menlu.
3. Pada pertemuan bilateral Menlu RI-Menlu Afsel tanggal 6 Februari 2017 di Cape Town, disepakati bahwa pertemuan tersebut merupakan SKB ke-2 kedua negara.

4. Sementara itu, *Joint Trade Committee* (JTC) telah dilaksanakan dua kali pada tahun 2006 di Afsel dan tahun 2012 di Indonesia. Pertemuan JTC ke-3 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Pretoria, Afsel.
5. Afsel merupakan satu-satunya negara Afrika yang memiliki kesepakatan Kemitraan Strategis dengan Indonesia, suatu kemitraan yang disepakati melalui *Joint Declaration on a Strategic Partnership for a peaceful and Prosperous Future Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa* pada 17 Maret 2008. Sejak 2014, kedua Menlu menyetujui untuk membentuk *Plan of Action* (PoA) Kemitraan Strategis yang berlaku selama 5 tahun dan telah ditandatangani di hadapan kedua Kepala Negara pada waktu Kunjungan Kenegaraan Presiden Jacob Zuma ke Indonesia pada Maret 2017.

IV. PERBANDINGAN AFRIKA SELATAN DENGAN INDONESIA

Pembanding	Indonesia	Afrika Selatan
Luas Wilayah	1.904.569 km ²	1.219.090 km ²
Penduduk	257,56juta jiwa (2015) *World Bank	54,95 juta jiwa (2015) *World Bank
GDP Per Kapita	USD 3.346,5(2015) *World Bank	USD 5.691,7(2015) *World Bank
GDP Nominal	USD 861,93 milyar (2015) *World Bank	USD 312,79 milyar (2015) *World Bank
Cadangan Devisa	USD 103,26 milyar (2015) *World Bank	USD 41,62 milyar (2015) *World Bank
Foreign Direct Investment	USD 15,5 milyar (2015) *World Bank	USD 1,57 milyar (2015) *World Bank
Total Perdagangan Internasional	USD 292,98 milyar (2015) *International Trade Center	USD 149,22milyar (2015) *International Trade Center

V. PERKEMBANGAN TERKINI AFRIKA SELATAN

KEBIJAKAN LUAR NEGERI

1. Kementerian Luar Negeri Afsel (DIRCO) telah mengeluarkan dokumen Rencana Strategis Periode 2013-2018 yang menjelaskan berbagai kebijakan hubungan internasional Afsel selama periode tersebut. Terdapat sejumlah strategi yang menjadi

landasan tugas pokok dan fungsi DIRCO dalam periode 2013-2018, yang terdiri dari dua program utama sebagai berikut:

a. Hubungan internasional

Penguatan hubungan ekonomi dan politik bertujuan:

- Memperkuat hubungan bilateral melalui kesepakatan ekonomi dan politik di berbagai kawasan di dunia
- Meningkatkan promosi *Trade, Tourism and Investment* (TTI) Afsel
- Mengedepankan konsep *marketing* dan *branding* yang menampilkan Afsel sebagai negara demokratis yang stabil, tujuan investasi yang aman, dan mitra dagang yang bisa diandalkan
- Mendukung program yang ada untuk berbagai kawasan antara lain Afrika, Amerika dan Karibia, Asia dan Timur Tengah serta Eropa

b. Kerja sama Internasional

Partisipasi dalam Sistem Pemerintahan Global bertujuan:

- Melanjutkan peran dan partisipasi aktif dalam fora multilateral termasuk PBB dan seluruh organ bagiannya
 - Mengedepankan prinsip damai untuk penyelesaian konflik internasional yang sesuai Piagam PBB dan hukum internasional
 - Mendukung realisasi nyata dari strategi, rencana aksi, komitmen yang telah disepakati dalam forum besar PBB untuk mencapai *international development goals* (IDGs) termasuk *Millennium Development Goals* (MDGs)
2. Dalam kerja sama kawasan, Afsel memperkuat integrasi politik dan ekonomi *Southern African Development Community* (SADC) dengan tujuan:
- Mengedepankan agenda integrasi pembangunan Afrika bagian selatan termasuk di dalamnya antara lain integrasi perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan koordinasi kebijakan antar-sektor
 - Memperkuat kohesi politik SADC
3. Selain itu, Afsel juga memperkuat hubungan Selatan-Selatan dengan tujuan, yaitu:
- Memajukan penguatan kerja sama Selatan-Selatan
 - Mendukung agenda besar Selatan-Selatan di berbagai fora

POLITIK

1. Sejak berakhirnya era *apartheid* pada April 1994, Afsel telah menganut sistem politik presidensial multi-partai. Mayoritas penduduk Afsel yang merupakan warga kulit hitam, masih memiliki trauma terhadap rezim *apartheid* di masa lampau. Masyarakat kulit hitam di Afsel selama ini memberikan dukungan yang besar kepada ANC (*African National Congress*) sebagai partai politik yang pernah dipimpin oleh Nelson Mandela dengan warisan yang telah membawa Afsel terlepas dari rezim *apartheid*.
2. Meskipun dengan tingkat dukungan yang menurun, Pemilu Afsel yang dilaksanakan pada 7 Mei 2014 berhasil memenangkan kembali partai ANC (dengan perolehan suara

sebesar 62,15%) untuk memimpin kembali Parlemen dan Pemerintahan AfSel. Berdasarkan konstitusi, Ketua partai pemenang Pemilu berhak menjabat sebagai Presiden AfSel untuk masa lima tahun. Dengan menguasai parlemen secara mayoritas dan memegang jabatan Presiden, dapat diperkirakan ANC cukup leluasa menjalankan kebijakan serta program politik dan ekonomi dalam dan luar negeri AfSel.

3. Dalam Pemilu Tingkat Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2014 di atas, terdapat 200 partai politik yang mendaftar namun hanya 33 partai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu. Selain ANC, terdapat 12 partai lain yang memperoleh kursi di Parlemen, utamanya *Democratic Alliance* (DA), *Economic Freedom Fighters* (EFF), *Inkatha Freedom Party* dan *National Freedom Party*. Partai DA dan EFF menjadi oposisi utama ANC dengan masing-masing memperoleh 22,23% dan 6,35% suara.
4. Pasca wafatnya mantan Presiden Nelson Mandela, partai ANC sudah mulai mengalami “keretakan” di tubuh partai karena kehilangan figur penting ANC. Jacob Zuma, Presiden AfSel saat ini yang juga sebagai ketua partai ANC dianggap belum dapat menjadi sosok pemimpin yang diharapkan. Hal ini, antara lain, karena Presiden Zuma diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi, terutama kasus pembangunan kediaman pribadi Zuma di Nkandla, Kwazulu-Natal yang ditengarai menggunakan anggaran negara sebesar Rand 246 juta (equivalent USD 24,6 juta). Selain itu banyak tokoh ANC lainnya mendapatkan tuduhan melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Sementara itu, dukungan terhadap partai petahana nampak semakin berkurang, ditandai dengan penurunan drastis jumlah suara yang diperoleh ANC pada Pemilu Pemerintahan Lokal pada bulan Agustus 2016. Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilu Afrika Selatan, total suara ANC mengalami penurunan sebesar 8,04%, yaitu dari 61,95% di tahun 2011 menjadi 53,91% tahun 2016. Hal ini diperkirakan akibat perpecahan internal partai dan merosotnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan ANC.
6. Situasi ini menyebabkan ANC kehilangan kekuasaannya di beberapa daerah. Partai oposisi terbesar, *Democratic Alliance* (DA), yang sebelumnya hanya memerintah atas satu *metropolitan municipality* saja (Cape Town/ibukota legislatif) saat ini telah berhasil merebut kepemimpinan atas tiga kota penting lainnya, yaitu Tshwane (Pretoria/ibukota administratif), Johannesburg dan Nelson Mandela Bay. Dalam membangun kekuatannya ini, DA membentuk koalisi dengan beberapa partai oposisi lain, utamanya *Economic Freedom Fighters* (EFF) yang dipimpin oleh mantan pemimpin sayap pemuda ANC.
7. Tahun 2017 merupakan tahun terakhir bagi Zuma untuk menjabat Presiden ANC. Sejak 2014, Presiden Zuma telah menegaskan tidak akan maju kembali pada tahun 2017 dan akan memberikan kesempatan kepada kader penerus lain. Hingga saat ini, terdapat dua kandidat yang diperkirakan akan bersaing pada Konferensi Nasional ANC akhir tahun ini untuk menggantikan Jacob Zuma sebagai presiden partai, yaitu Deputy Presiden Afrika Selatan (dan juga ANC), Cyril Ramaphosa, dan Mantan Ketua Komisi Uni Afrika, Nkosazana Dlamini-Zuma. Dengan pencalonan ini, diperkirakan ANC akan semakin terbagi secara internal dengan masing-masing kubu mendukung kandidat presidennya.

8. Dalam pidato tahunan/*State of the Nation Address* (SONA) tanggal 9 Februari 2017 di Cape Town, Presiden Zuma menyampaikan sejumlah kebijakan luar negeri. Termasuk dalam hal ini, peran Afrika Selatan sebagai Ketua *Southern African Development Community* (SADC), yang beranggotakan 14 negara, dimulai pada bulan Agustus 2017 serta partisipasi Afsel dalam upaya mediasi, operasi pemeliharaan perdamaian dan inisiatif penciptaan perdamaian di beberapa negara Afrika (Kerajaan Lesotho, Republik Demokratik Kongo, Burundi, Mozambik, Sudan Selatan, Somalia dan Libya) melalui kehadiran *South African National Defence Force*.
9. Presiden Zuma juga menyampaikan komitmen Afrika Selatan atas *One China Policy* sekaligus menegaskan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai mitra kerjasama penting bagi Afrika Selatan. Terkait isu Palestina, disampaikan bahwa pendudukan Israel atas Palestina telah menginjak tahun ke-50 pada tahun 2017. Pemerintah Afrika Selatan berpandangan bahwa ekspansi pembangunan Israel tidak sejalan dengan upaya global untuk mewujudkan solusi dua negara dan *Oslo Accord*. Dengan semangat yang sama, Presiden Zuma juga mengharapkan kiranya penerimaan kembali keanggotaan Maroko di Uni Afrika dapat menjadi katalis bagi penyelesaian isu Sahara Barat.
10. Hingga tahun 2016, isu xenophobia masih belum hilang dari kalangan masyarakat Afsel. Pada 20-23 Juni 2016 gelombang kerusuhan melanda Kota Tshwane, dipicu oleh ketidakpuasan politik di internal ANC, namun melebar kepada penjarahan took-toko dan penyerangan warga asing seperti WN Somalia, Nigeria dan Pakistan. Sejak *apartheid* berakhir pada tahun 2004, peristiwa-peristiwa xenophobia seperti insiden pembunuhan dan perusakan properti orang asing justru meningkat. Salah satu insiden yang terkenal adalah Kerusuhan Mei 2008 yang menewaskan 62 orang, kerusakan properti milik imigran dan migrasi besar-besaran pendatang asing.
11. Xenophobia di Afsel umumnya ditargetkan pada pendatang atau pengungsi dari kawasan Afrika seperti Somalia, Nigeria, Zimbabwe, Mozambik dan dari Asia Selatan, terutama Pakistan dan Bangladesh. Afsel menjadi tujuan utama para pengungsi dan pendatang dengan motif ekonomi yang mencapai 2,2 juta (2011). Jumlah ini ditambah dengan pendatang ilegal yang diperkirakan sebanyak 500.000 orang.

EKONOMI

1. Afsel merupakan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di kawasan Afrika, dengan PDB sebesar USD 314,6 milyar (2015) yang mencakup 20% dari total keseluruhan benua Afrika setelah Nigeria dan Mesir. Afsel juga mendapat predikat *upper-middle income country* dari Bank Dunia. Berdasarkan analisa IMF, pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan pada tahun 2016 secara keseluruhan mencapai 0,5%. Hal ini merupakan penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai 1,3%. Pada tahun 2017 dan 2018, IMF memperkirakan pertumbuhan sebesar masing-masing 0,8% dan 1,6%. Sementara itu, di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi bertumbuh sebesar 2,7%, Bank Dunia memproyeksikan Afsel hanya akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6% (2017), 1,1% (2018) dan 2% (2019). Prediksi tersebut masih berada di bawah proyeksi *South Africa Reserve Bank* (SARB), yaitu sebesar 1,0% (2017), 1,5% (2018) dan 1,7% (2019).

2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya proyeksi tersebut adalah merosotnya tingkat kepercayaan investor kepada Afsel sebagai dampak dari penurunan peringkat *sovereign credit* yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional *S&P Global Ratings* dan *Fitch Ratings* setelah Presiden Jacob Zuma melakukan pergantian Menteri Keuangan pada bulan April 2017. Dalam laporan *Global Economic Prospectus* yang berjudul “*A Fragile Recovery*”, Bank Dunia berulang kali menekankan tentang ketidakpastian situasi politik dan kebijakan di Afsel yang akan membebani sektor investasi.
3. Pada bulan Juni 2017, Afsel telah menyusul 2 (dua) negara BRICS, Brazil dan Rusia kembali masuk ke dalam kondisi resesi untuk pertama kalinya sejak tahun 2009. Lembaga statistik Afsel, Stats SA dalam laporannya pada hari Selasa, 6 Juni 2017 menyatakan bahwa perekonomian Afsel pada kuartal pertama 2017 telah mengalami kontraksi sebesar 0,7%, menyusul kontraksi sebesar 0,3% yang terjadi pada kuartal terakhir 2016.
4. Kontraksi ini gagal diprediksi oleh Afsel, mengingat pada *Budget Review 2017* pada awal tahun 2017, Afsel memproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,3%. Kondisi resesi ini langsung berdampak pada menurunnya nilai mata uang Rand sebesar 1% menjadi Rand 12.81 per USD 1.
5. Menurunnya GDP pada mayoritas sektor Afsel, terutama pada pada sektor *trade* dan *manufacturing* menjadi penyebab utama terjadinya kontraksi. Pertumbuhan positif hanya dilaporkan terjadi pada dua sektor, yaitu *mining* dan *agriculture*. Analisis ekonomi juga menyebutkan ketidakpastian situasi politik menjadi salah satu alasan utama terjadinya kontraksi, terutama menjelang Konferensi Nasional Partai ANC, dimana pengganti Presiden Zuma sebagai ketua Partai ANC akan dipilih pada bulan Desember. Apabila kontraksi ini terus berlanjut di kuartal kedua, diprediksi akan menyebabkan terjadinya penurunan GDP, peningkatan angka pengangguran (saat ini telah mencapai 27%), dan memperbesar resiko penurunan kembali status investasi Afsel.
6. Pemulihan kekuatan ekonomi Afsel diprediksi akan lemah, mengingat kegagalan panen akibat kekeringan pada tahun 2016, serta meningkatnya harga komoditas ekspor utama Afsel. Sementara itu, industri manufaktur Afsel juga diprediksi akan melemah pada bulan Juni 2017, setelah mengalami kenaikan sejak bulan Oktober 2016. Penurunan ini ditandai dengan penurunan *new orders*, tingkat *employment*, dan *stock of purchases*.
7. Nilai investasi akan mengalami penurunan sebesar 2% pada tahun 2017. Namun demikian, hal tersebut juga diperkirakan akan kembali naik sebesar 1.5% pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan terus melemah pada 2017 diprediksi akan kembali menguat pada pada tahun 2018, dikarenakan oleh kenaikan konsumsi privat dan nilai ekspor yang didukung oleh pemulihan harga komoditas dan pertumbuhan di pasar ekspor.
8. Pengangguran dan ketidaksetaraan di Afsel akan tetap tinggi, sebagai cermin dari kesenjangan keterampilan yang besar dan rendahnya kualitas pendidikan. Nilai inflasi Afsel juga diprediksi akan tetap tinggi, dikarenakan oleh depresiasi mata uang Rand dan kenaikan harga pangan.

9. Menurut data yang dikeluarkan oleh *South African Revenue Service (SARS)* pada bulan Maret 2017, terdapat peningkatan surplus neraca perdagangan sebesar 5.2 miliar Rand, menjadi 11.44 miliar Rand dibandingkan dengan data pada bulan Februari 2017. Lebih lanjut, pada kuartal pertama 2017 tercatat peningkatan surplus neraca perdagangan sebesar 4.98 miliar Rand dibandingkan dengan defisit 24.27 miliar Rand pada periode yang sama tahun 2016. Data ini termasuk data perdagangan dengan Botswana, Lesotho, Namibia dan Swaziland (BLNS), dimana total ekspor mencapai 101.23 miliar Rand, dengan impor sebesar 89.79 miliar Rand.
10. Lebih lanjut, SARS juga melaporkan adanya peningkatan ekspor sebesar 16% atau sebesar 13.96 miliar Rand, pada kurun waktu Februari 2017 hingga Maret 2017. Sementara nilai impor juga tercatat meningkat sebesar 8,9% atau 7.32 miliar Rand.
11. Untuk kuartal pertama 2017, nilai ekspor tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 8% menjadi 268.68 miliar Rand, dari nilai 248.72 miliar Rand yang dilaporkan pada 2016. Namun nilai impor tercatat mengalami penurunan sebesar 3,4% menjadi 263.71 miliar Rand pada periode yang sama tahun lalu.
12. Produk ekspor utama Afrika Selatan adalah logam mulia dan batu, diikuti oleh kendaraan, peralatan transportasi, mesin-mesin dan peralatan elektronik. Sementara impor utama Afrika Selatan diantaranya adalah mesin-mesin, peralatan elektronik, kendaraan serta peralatan transportasi.
13. Mitra ekspor terbesar Afrika Selatan adalah Asia, dengan nilai ekspor sebesar 30 miliar Rand, diikuti oleh Afrika dengan 27 miliar Rand, kemudian Eropa dengan 26 miliar Rand, dan terakhir, Amerika yang berjumlah lebih dari 8 miliar Rand. Sementara itu, mitra impor terbesar Afrika Selatan adalah Asia, dengan nilai impor 35 miliar Rand, diikuti oleh Eropa dengan nilai impor 32 miliar Rand.
14. Afsel merupakan *anggota Southern African Custom Union (SACU)*. Dibawah SACU, Afsel bersama dengan Botswana, Lesotho, Namibia dan Swaziland menerapkan kebijakan *common external tariff* sehingga kebijakan tarif eksternal SACU harus dirundingkan dulu dengan lima negara anggota. Selain itu, Afsel juga menjadi anggota *Southern Africa Development Community (SADC)*, yang pada tahun 2008 meluncurkan SADC FTA dalam rangka perwujudan perdagangan bebas tarif.
15. Tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah Afrika Selatan dalam memperbaiki perekonomian antara lain:
 - kekurangan pasokan listrik,
 - kekurangan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar,
 - tingkat pengangguran yang tinggi (27,1 % pada tahun 2016),
 - seringnya pemogokan buruh
 - menurunnya *global competitiveness* (peringkat ke-47)
 - tingginya kesenjangan pendapatan (Gini ratio: 0.63%)
 - kekeringan dalam 2 tahun terakhir yang menyebabkan turunnya produksi pertanian
16. Dalam pidato tahunan tanggal 9 Februari 2017 di Cape Town, Presiden Zuma menyampaikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan pada tahun 2017 akan

mengalami peningkatan sebesar 1.3% dari 0.5% pada tahun 2016. Namun demikian, pemerintah juga menyadari terjadinya peningkatan tingkat pengangguran, yang mencapai 27,1% (tertinggi sejak resesi tahun 2009), serta ancaman turunnya *investment-grade credit rating* dari *S&P Global Ratings and Fitch Ratings*. Lembaga Peningkat Kredit Internasional pada bulan Mei 2017 telah memberikan penilaian “*junk status*” kepada Afsel. *Moody’s Investors Service* memberikan nilai *sovereign credit* Baa3 (*negative outlook*), *Standard and Poor’s* memberikan nilai *sovereign credit* BB+ (*negative outlook*), dan *Fitch Ratings* memberikan nilai *sovereign credit* BB+ (*stable outlook*).

17. Terkait kebijakan *economic transformation*, sejumlah pihak berpandangan bahwa kebijakan dimaksud akan sulit dilaksanakan, mengingat perubahan struktur dan sistem ekonomi melalui regulasi dan legislasi hanya akan efektif dalam mengubah sistem *ownership* dari warga kulit putih ke warga kulit hitam. Namun demikian, perubahan tersebut tidak serta merta akan mengatasi berbagai permasalahan dalam negeri di Afrika Selatan. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintahan dalam mengelola surplus ekonomi menjadi pembangunan ekonomi di sektor riil, yang didukung oleh situasi politik yang kondusif.
18. Pada awal tahun 2017, Afrika Selatan telah meluncurkan program *Invest SA-One Stop Shop* untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi penanam modal dengan mengurangi jalur birokrasi dan administrasi dalam pengurusan ijin usaha. *Invest SA* akan berada dibawah Departemen Perdagangan dan Industri (DTI) dan akan diluncurkan di seluruh Afrika Selatan selama tiga tahun ke depan.
19. Investasi di sektor pertambangan terbaru dilakukan oleh perusahaan pertambangan Inter alloys Trading Ltd. bersama dengan Onicaster Pty. Ltd sebesar 675 juta Rand untuk pertambangan bijih besi pada *Rooinekke Iron Ore Project* di kota Griekwastad, Provinsi Northern Cape. Penanaman modal tersebut diperkirakan dapat menyerap sebanyak 150 tenaga kerja. Selain itu, sepanjang 2017-2019, Inter alloy Lyd. juga berencana menginvestasikan sebesar 428 juta Rand bagi pembangunan rel kereta api, sebesar 80 juta Rand untuk tambang *Rooinekke*, dan 167 Rand untuk investasi lainnya di provinsi Northern Cape.

SOSIAL BUDAYA

1. Afsel merupakan negara yang menyatakan diri sebagai *Rainbow Nation* mengingat latar belakang dan komposisi masyarakatnya yang beranekaragam. Istilah *Rainbow Nation* dicetuskan oleh mantan presiden kulit hitam pertama Afsel yaitu mendiang Nelson Mandela yang mengutamakan rekonsiliasi dan persatuan bangsa pasca rezim *apartheid*.
2. Masyarakat Afsel memberikan penghormatan yang tinggi kepada mendiang Nelson Mandela dengan menyebutnya sebagai *Father of the Nation* dan juga meneladani falsafah Nelson Mandela yaitu *Ubuntu* yang merupakan konsep semangat persatuan dan keselarasan dalam hidup bersosialisasi serta dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.
3. Pemerintahan Afsel yang saat ini dipimpin oleh ANC masih belum bisa menyelesaikan beberapa masalah utama rakyat Afsel yakni masalah mutu pendidikan, tingkat

pengangguran yang cukup tinggi, kesetaraan *gender*, penurunan angka kemiskinan, pemerataan pemilikan tanah pertanian dan kesetaraan kesejahteraan bagi masyarakat kulit hitam.

4. Masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan penyakit HIV/AIDS menjadi salah satu isu utama dalam negeri Afsel, khususnya bagi warga Afsel kulit hitam. Sekitar 60% warga kulit hitam Afsel masih berada di bawah garis kemiskinan dan 20% populasinya terjangkit HIV/AIDS. Afsel juga mengalami kekeringan terparah sepanjang 2016. Kondisi kekeringan ekstrim ini telah membuat kering banyak bendungan dan menghancurkan sektor pertanian. Departemen Perairan dan Sanitasi di pertengahan tahun 2016 telah memberlakukan pembatasan penyediaan air di beberapa wilayah kotapraja Johannesburg, yaitu pengurangan kuota sebanyak 15% bagi konsumen domestik dan 20% untuk komunitas petani. Pembatasan tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun hidrologi pada bulan Mei tahun 2017.

Gerakan Protes Mahasiswa

5. Dunia pendidikan tinggi Afrika Selatan dilanda protes mahasiswa berskala nasional sepanjang tahun 2016. Protes tersebut diawali oleh tuntutan mahasiswa (umumnya mahasiswa kulit hitam) yang menuntut dihapuskannya simbol-simbol apartheid di seluruh perguruan tinggi Afsel. Simbol-simbol dimaksud termasuk patung-patung tokoh kulit putih Afsel dan penggunaan bahasa Afrikaans sebagai bahasa pengantar perkuliahan. Protes ini telah memicu ketegangan antara siswa kulit hitam dan kulit putih. Tuntutan penghapusan bahasa Afrikaans sebagai bahasa pengantar perkuliahan telah dipenuhi oleh pihak universitas dengan penetapan bahasa Inggris sebagai bahasa utama pengantar perkuliahan.
6. Protes tersebut kemudian berlanjut menjadi protes untuk menuntut dihapuskannya biaya perkuliahan yang dikenal sebagai gerakan *#FeesMustFall*. Protes *#FeesMustFall* berlangsung dalam skala nasional dan telah menghentikan kegiatan perkuliahan di tahun akademik 2016 untuk waktu yang cukup lama. Protes ini juga kerap berujung pada tindak kekerasan dan pengrusakan fasilitas kampus. Di awal tahun 2017 aktivis mahasiswa menyatakan bahwa protes *#FeesMustFall* akan tetap berlanjut sampai dengan tuntutan dihapuskannya biaya perkuliahan dipenuhi oleh Pemerintah Afsel.
7. Dalam pidato tahunan Presiden Zuma tanggal 9 Februari 2017 di Cape Town, terlihat pemerintah berupaya meredam berbagai tuntutan yang diajukan oleh rakyat Afrika Selatan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Secara khusus, pemerintah berupaya meredam aksi protes mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan gratis. Pemerintah menyadari bahwa keuangan pemerintah tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan tersebut yang akan membebani keuangan Negara dan menyebabkan pemerintah tidak mampu mendanai program-program sosial lainnya terutama pengentasan kemiskinan.

VI. KERJA SAMA POLITIK

Dialog Maritim Indonesia-Afrika

1. Dalam rangka implementasi visi maritim Indonesia, Kemlu c.q. Dit. Afrika berencana untuk menyelenggarakan Dialog Maritim Indonesia-Afrika pada Agustus 2018. Dialog bertujuan untuk mempromosikan pembangunan kemaritiman Indonesia serta mendorong kerja sama konkret di bidang kemaritiman antara RI- Afrika Sub-Sahara. Dialog akan menghadirkan narasumber nasional dan internasional terkait kemaritiman dan dihadiri oleh Perwakilan Negara-negara Afrika Sub-Sahara di Jakarta.
2. Adapun dialog maritim direncanakan setingkat pejabat senior dengan membahas penguatan penegakan hukum bagi kejahatan di laut. Termasuk dalam hal ini, *illegal, unreported and regulated fishing*, pencucian uang yang memanfaatkan aktivitas ilegal di laut dan isu perompak. Forum juga ditujukan untuk memperkuat *norm-setting* terhadap pidana perikanan, mekanisme pelacakan kapal dan perlindungan terhadap anak buah kapal.
3. Hubungan bilateral RI-Afsel yang selama ini terbina dengan baik, juga ditandai dengan saling kunjung antar *dignitaries*, antara lain, sbb:

Indonesia ke Afsel

1. Presiden Soeharto (November 1997)
2. Presiden Abdurrahman Wahid (April 2000)
3. Presiden Megawati Soekarnoputri (September 2002)
4. Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (September 2005)
5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Maret 2008)
6. Wamenlu RI A. M. Fachir (Februari 2016)
7. Menlu Retno L.P. Marsudi (Februari 2017)

Afsel ke Indonesia

1. Presiden Nelson Mandela:
 - o 1990 (sebagai Ketua ANC);
 - o September 1994;
 - o Juli 1997;
 - o 2002 (sebagai Mantan Presiden).
 2. Presiden Thabo Mbeki (April 2005)
 3. Deputi Presiden Phumzile Mlambo-Ngcuka (April 2006)
 4. Wakil Presiden Cyril Ramaphosa (April 2015)
 5. Menlu Maite Nkoana-Mashabane (April 2015 dan Agustus 2016)
 6. Presiden Jacob Zuma (Maret 2017)
4. Kemajuan dalam hubungan bilateral RI-Afsel juga ditandai dengan kerja sama saling dukung di berbagai organisasi internasional sebagai berikut:
- a. *Postal Operations Council* dari *Universal Postal Union* (2013-2016)
 - b. *International Telecommunication Union* (2014-2018)
 - c. Dewan HAM PBB (2016-2017)
 - d. Dewan *International Maritime Organization* (IMO) Kategori C
 - e. *International Law Commission*

5. Dalam pertemuan Menlu RI dengan Menlu Maite Nkoana-Mashabane di sela-sela *World Islamic Economic Forum* ke-12 di Jakarta, Agustus 2016, kedua Menlu sepakat untuk:
 - a. menjajaki jadwal pertemuan ke-2 SKB di Afsel sebelum akhir tahun 2016 (telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017 di Cape Town, Afsel).
 - b. menyelesaikan sejumlah kesepakatan yang *pending* termasuk Perjanjian Bebas Visa Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.
 - c. selain itu, Menlu RI juga menyampaikan tentang peningkatan aktivitas lobi separatis Papua di Afsel dan mendapat tanggapan positif Menlu Afsel.
6. Pada tanggal 6 Februari 2017, Menlu RI telah melakukan kunjungan ke Cape Town sebagai *special envoy* IORA *Leaders' Summit*. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI telah melakukan pertemuan dengan Menlu Afsel dan kunjungan kehormatan kepada Presiden Zuma.
7. Kunjungan Kehormatan Menlu RI kepada Presiden Afsel dan dibahas:
 - a. Indikasi positif untuk melakukan kunjungan ke Indonesia memenuhi Undangan Presiden RI untuk Presiden Afsel menghadiri KTT IORA dan melakukan kunjungan kenegaraan.
 - b. Pandangan Presiden RI bahwa Afrika merupakan prioritas Indonesia dalam kerja sama. Presiden Afsel Setuju agar kedua negara lebih banyak mengedepankan isu dan kerjasama ekonomi.
 - c. Presiden Zuma memandang penting peranan IORA dan setuju dengan pandangan Menlu RI bahwa IORA masih *under-utilized*.
 - d. Menlu RI menyerahkan Surat Presiden RI tentang permintaan dukungan Afsel untuk pencalonan RI sebagai Anggota Tidak tetap DK PBB periode 2019-2020
 - e. Menlu RI sampaikan bahwa produk RI ke Afsel dikenakan tarif tinggi. Untuk itu, RI siap memulai pembahasan PTA RI-SACU dan mengidentifikasi tarif yang bisa dikurangi.
8. Dalam pertemuan dengan Menlu Afsel, kedua Menlu sepakat untuk
 - a. Pertemuan kedua Menlu ditetapkan sebagai SKB ke-RI-Afsel;
 - b. Menyelesaikan *Plan of Action* Kemitraan Strategis 2017-2021, MoU Kerjasama Kelautan dan Perikanan, MoU Kerjasama Pelatihan Diplomatik, dan Perjanjian Bebas Visa untuk Paspor Diplomatik dan Dinas;
 - c. Kesiapan Indonesia untuk memulai pembahasan dan identifikasi tarif impor yang dapat dikurangi oleh kedua negara;
 - d. Mendorong kerjasama perbankan, di mana Indonesia Eximbank menawarkan opsi pembiayaan ekspor bagi dunia usaha kedua negara;
 - e. Terkait isu kampanye gerakan Papua Barat, Afsel menghargai kedaulatan RI dan menolak balkanisasi suatu negara.
9. Menlu RI telah menghadiri Forum Bisnis RI-Afsel di Cape Town, tanggal 6 Februari 2017. Forum Bisnis dihadiri oleh perusahaan RI dari PT. PAL, PT Pindad, Ketua Kadin Komite Afrika, dan Indonesia Eximbank. Dalam sambutan, Menlu antara lain menyampaikan berbagai keunggulan RI, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia tenggara, dan stabilitas politik RI.

10. Kunjungan Kenegaraan Presiden Afsel, Jacob Zuma, bersama tiga Menteri serta sejumlah pejabat senior Afsel ke Indonesia telah dilaksanakan pada 5-8 Maret 2017. Presiden Afsel juga menghadiri penyelenggaraan *IORA Leaders' Summit* dan menjadi pembicara dalam acara *IORA Business Summit*. Beberapa hasil pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden Afsel adalah sebagai berikut:
- a. Presiden Afsel telah mengundang Presiden RI untuk melakukan Kunjungan Kenegaraan balasan ke Afsel. Hingga saat ini, belum terdapat indikasi mengenai rencana kunjungan Presiden RI ke Afsel.
 - b. Permintaan penurunan tarif komoditas prioritas kedua negara. Dalam kaitan ini, akan dilakukan studi pembentukan *Preferential Trade Agreement* antara Indonesia dengan South African Customs Union.
 - c. Presiden RI telah mengusulkan inisiatif penyelenggaraan *Indonesia-Africa Forum* dan Dialog Maritim di tahun 2018 di Indonesia.
 - d. Bekerja sama mendorong Kerja Sama Selatan-Selatan, melalui penguatan kerja sama dalam kerangka IORA dan *New Asian African Strategic Partnership*.
 - e. Presiden Afsel telah mengindikasikan untuk memberikan dukungan atas pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
 - f. Penandatanganan tiga dokumen kerja sama, yaitu: Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Dinas dan Diplomantik, MoU Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomantik, dan Rencana Aksi 2017-2021 Kemitraan Strategis Indonesia-Afsel.

New Asian African Strategic Partnership (NAASP)

1. Kedua negara merupakan penggerak utama bangunan kerjasama baru Asia Afrika melalui *New Asian-African Strategic Partnership (NAASP)*. NAASP dicetuskan sewaktu KTT Asia Afrika 2005 di Jakarta, dalam rangkaian peringatan *Jubilee KAA 1955* di Bandung Indonesia. Saat ini NAASP telah berhasil menggulirkan beberapa kerjasama konkret Asia-Afrika, baik dalam rangka pembangunan kapasitas SDM maupun berbagai bentuk kerja sama lainnya.
2. Pihak Afsel sebagai *co-chair* telah menjadi tuan rumah bagi berbagai kegiatan NAASP. Termasuk dalam hal ini, *NAASP Senior Officials Meeting* di Durban, September 2006 untuk mengevaluasi perkembangan implementasi NAASP dan *NAASP Co-Chairs' Meeting* di Tshwane (Pretoria), tahun 2010 untuk membahas rencana KTT ke-2 NAASP pada tahun 2011 dan kandidat *co-chair* dari Asia untuk periode berikutnya.
3. KTT NAASP ke-2 yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2009 telah tertunda beberapa kali dan hingga saat ini masih belum terlaksana. Berdasarkan informasi terkini yang diperoleh dari Dubes Afrika Selatan di Jakarta, hingga saat ini Pemerintah Afrika Selatan masih belum memutuskan mengenai jadwal pelaksanaan KTT NAASP ke-2.
4. Indonesia memandang perlunya diselenggarakan KTT NAASP ke-2 guna mendorong kerja sama NAASP, utamanya untuk menyepakati hasil-hasil pembahasan pertemuan SOM sebelumnya yang telah menyepakati bidang kerja sama prioritas yang akan didorong dalam kerangka NAASP.
5. Afsel berpandangan bahwa NAASP perlu dibuat relevan untuk kepentingan negara-negara di kawasan karena saat ini kecenderungan yang terjadi adalah fokus kerja sama

negara anggota Uni Afrika dengan negara non anggota dilakukan melalui mekanisme bilateral. Dalam konteks kerja sama NAASP, Afsel saat ini melakukan upaya agar NAASP dapat diintegrasikan ke dalam struktur Uni Afrika, namun proses tersebut masih menunggu diselesaikannya *Global Partnership Review*, sebagai panduan utama integrasi, yang masih dalam pembahasan Uni Afrika.

6. Pada 1 Maret 2014 di Jakarta, Indonesia dan Afsel selaku *Co-chair* melakukan *launching* fase ke-2 NAASP *capacity building program* untuk Palestina (dalam kerangka *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development II*). Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI dan Menlu Afsel melakukan pertemuan bilateral membahas perkembangan dan upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Kedua Menlu antara lain menyepakati agar dibentuk *Plan of Action* implementasi Kemitraan Strategis antar kedua negara.

Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 NAASP di Jakarta dan Bandung, tahun 2015

7. Indonesia kembali menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika 2015 yang diselenggarakan bersamaan dengan Peringatan ke-60 KAA dan ke-10 NAASP pada tahun 2015. Hal ini dimanfaatkan sebagai momentum yang tepat bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk membahas upaya-upaya memperkuat kerja sama guna mendorong kemajuan di kedua kawasan. Disamping itu, peringatan tersebut juga menegaskan kembali relevansi Semangat Bandung 1955 (*Bandung Spirit*) untuk menjawab tantangan global saat ini.
8. Keseluruhan rangkaian pertemuan tersebut mengusung tema utama “*Strengthening South-South Cooperation to Promote World Peace and Prosperity*”, dihadiri delegasi dari 93 negara Asia Afrika, termasuk Indonesia, 15 negara *observer* dan 12 Organisasi Internasional serta sekitar 650 wakil dunia usaha dari 34 negara-negara Asia Afrika.
9. KTT Asia Afrika mensahkan tiga dokumen akhir yaitu (i) *Bandung Message*, yang merefleksikan komitmen negara-negara Asia-Afrika untuk menciptakan tatanan dunia baru yang adil; (ii) *Declaration on Reinvigorating the NAASP*, yang mengupayakan dukungan konkrit bagi kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, infrastruktur dan pembangunan maritim, serta (iii) *Declaration on Palestine*, yang menyatakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
10. Pada dokumen *Declaration on Palestine*, negara-negara Asia Afrika termasuk Indonesia menyampaikan komitmen untuk mendukung pembangunan dan penguatan institusi nasional Palestina melalui program-program *capacity building*, baik melalui kerja sama bilateral, triangular maupun *South-South Cooperation* yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan rakyat Palestina.
11. Posisi Dasar
 - a. Indonesia memandang perlunya diselenggarakan KTT NAASP ke-2 guna mendorong kerja sama NAASP, utamanya untuk menyepakati hasil-hasil pembahasan pertemuan SOM sebelumnya yang telah menyepakati bidang kerja sama prioritas yang akan didorong dalam kerangka NAASP. KTT NAASP ke-2 yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2009 telah tertunda beberapa kali dan

hingga saat ini masih belum terlaksana. Berdasarkan informasi terkini yang diperoleh dari Dubes Afrika Selatan di Jakarta, hingga saat ini Pemerintah Afrika Selatan masih belum memutuskan mengenai jadwal pelaksanaan KTT NAASP ke-2.

- b. Indonesia memandang perlunya dilakukan pergantian *Co-Chairs* NAASP. Dalam hal ini, pihak Asia dan Afrika perlu melakukan koordinasi internal guna menentukan *Co-Chairs* dari masing-masing pihak.
- c. Sesuai dengan kesepakatan dalam *Declaration on Reinvigorating the NAASP* pada KTT Asia Afrika tahun 2015 lalu, Indonesia perlu mendorong penguatan institusional NAASP antara lain dengan mendorong diadakannya pertemuan *Co-chairmanship* NAASP setiap 4 tahun sekali, Pertemuan Tingkat Menteri di sela-sela Pertemuan Sidang Majelis Umum PBB setiap 2 tahun sekali dan Pertemuan tahunan antar *Co-chairs* NAASP.

Indian Ocean Rim Association (IORA)

12. Afsel adalah Wakil Ketua (*Vice Chair*) IORA pada masa keketuaan Indonesia periode 2015-2017. Berdasarkan mekanisme pada IORA, *Vice Chair* akan menjadi *Chair* IORA pada periode berikutnya. Dengan demikian, Afsel merupakan Ketua IORA periode 2017-2019. Penyerahan Keketuaan IORA dari Indonesia ke Afsel akan dilaksanakan pada waktu IORA Council of Ministers' Meeting di Durban, Afsel, pada bulan Oktober 2017.
13. Sebagai *Vice-Chair IORA*, Afsel berperan aktif dalam mendukung inisiatif-inisiatif Indonesia, khususnya, dalam penyusunan IORA Concord. Di samping itu, Afsel merupakan salah satu penggagas penyusunan *IORA Action Plan* yang akan menjadi dokumen pendukung dari IORA Concord.
14. Salah satu isu pada IORA yang mendapatkan perhatian Afsel adalah kerja sama *blue economy*. Dalam kaitan ini, secara domestik, Afsel memiliki "*Operation Phakisa*". Melalui program tersebut, pemerintah Afsel melakukan pendekatan komprehensif untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi kelautan yang ada di Afsel.
15. Sejak ditetapkannya *blue economy* sebagai *cross-cutting issue* IORA pada tahun 2013, Afsel telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan pelatihan terkait *blue economy*, yakni:
 - a. *IORA Blue Economy Core Group on Promoting Fisheries and Aquaculture and Maritime Safety and Security Cooperation in the Indian Ocean Region* (Mei, 2015)
 - b. *Second IORA Blue Economy Core Group Workshop "Maritime Connectivity and Financing for Development in the Indian Ocean"* (Juli 2016)

Kerja Sama ASEAN – SADC

16. Tahun 2015 merupakan tahun bersejarah bagi ASEAN melalui pembentukan ASEAN Community. Dalam hal ini, ASEAN tidak hanya akan mengadakan kerja sama di kawasan sendiri tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan negara maupun organisasi kawasan lainnya. Indonesia dan Afrika Selatan dapat menginisiasi

terbentuknya kerja sama kawasan Afrika bagian selatan, Southern African Development Community (SADC) dengan ASEAN.

G-20

17. Indonesia dan Afsel perlu membangun koordinasi dan kerjasama dalam memajukan kerja sama dalam G-20, khususnya dalam membahas isu-isu yang menjadi perhatian penting Negara-negara berkembang.

Kemitraan Strategis

18. Pada kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Afsel, Maret 2008, Presiden RI dan Presiden Afsel, Thabo Mbeki telah melakukan penandatanganan *Strategic Partnership (Joint Declaration on a Strategic Partnership for a Peaceful and Prosperous Future Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa)*
19. Pada Maret 2014 kedua negara sepakat untuk membentuk *Plan of Action (PoA) Kemitraan Strategis RI-Afsel 2015-2019*. Dalam pertemuan Menlu RI dan Menlu Afsel Maite Nkoana-Mashabane di sela-sela Peringatan KAA ke-60, April 2015, sepakat untuk mempercepat finalisasi PoA Kemitraan Strategis RI-Afsel. Dalam kunjungan kerja Dirjen Aspasaf ke Afsel, September 2015, kedua pihak sepakat untuk mengubah periode dokumen PoA dari sebelumnya tahun 2015-2019 menjadi tahun 2016-2020. Dokumen ini telah ditandatangani pada Maret 2017 oleh Menlu RI dan Menlu Afsel pada saat Kunjungan Kenegaraan Presiden Afsel ke Indonesia.
20. Tujuan PoA tersebut adalah sebagai alat kaji untuk melihat perkembangan bilateral kedua negara, di berbagai bidang seperti dalam hal kerjasama politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, energi, sumber daya alam, kelautan dan perikanan. Serta di bidang pertanian, pariwisata, perhubungan, iptek, pendidikan, pengkajian kebijakan, pelatihan, kebudayaan, kesehatan, teknologi informasi, pengembangan kapasitas dan konsuler.

Kerja Sama Industri Strategis

21. Dalam bidang kerja sama pertahanan, Indonesia dan Afsel mempunyai potensi untuk bekerjasama dalam mengembangkan industri strategis. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat interaksi awal dan saling kunjung antar pimpinan industri strategis di kedua negara, guna menjajaki kerja sama usaha yang melibatkan PT. PINDAD dan PT. DI dari Indonesia dengan kelompok usaha *Paramount Group* dan *Denel LTD (BUMN)* dari Afsel.
22. Pada tanggal 13 Mei 2011 PT. PINDAD dan Denel LTD menandatangani MoU kerja sama pengembangan produk sistem pertahanan dan persenjataan. Dalam hal ini, Denel LTD menyediakan *turret* dan *cannon* dan *interfaces* terkait kepada PT. PINDAD untuk dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam APC buatan PT. PINDAD.
23. Pada 2014, PT. Pindad dan *Rhein Metal* (anak perusahaan *Denel LTD*) menandatangani MoU kerja sama *co-production* munisi besar (termasuk artileri). PT. Pindad dalam hal

ini akan menjadi *hub* manufaktur di kawasan Asia Pasifik, sementara *Rhein Metal* akan menyediakan teknologi untuk keperluan produksi.

24. RI telah melakukan pembelian sejumlah alat komunikasi sebagai komponen untuk melengkapi panser Anoa.
25. Pada kesempatan pertemuan Menlu RI dan Menlu Afsel di sela-sela KTT AA April 2015, kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama industri strategis Afsel-RI, termasuk menjajaki bentuk kerja sama *joint venturing*. Selanjutnya, Wapres Afsel Cyril Ramaphosa dalam pertemuan bilateral dengan Wapres RI di sela-sela KTT tersebut kembali menekankan pentingnya untuk terus mendorong penguatan kerjasama industri strategis kedua negara.
26. Dalam rangka mendorong kerjasama industri strategis, pada 30 September 2015 Dirjen Aspasaf telah berkunjung ke *Denel Pretoria Metal Press* (grup usaha Denel). Dirjen Aspasaf menekankan mengenai pentingnya penguatan kerja sama antar BUMN kedua negara, antara lain dengan mendorong *cross fertilization*.
27. Sebagai implementasi dari Persetujuan Kerjasama Pertahanan yang ditandatangani 17 Maret 2008, Kemlu Afsel menyampaikan usulan untuk membentuk Komite Bersama Pertahanan (*Joint Defence Committee-JDC*), dan mengundang Menhan RI untuk meresmikan pembentukan JDC dimaksud pada Maret 2016. Kemhan RI menyampaikan tanggapan usulan pembentukan JDC RI-Afsel pada tahun 2017.
28. *Paramount Group* (PG), perusahaan pertahanan swasta terbesar di Afrika yang berkantor pusat di Afsel, pada November 2016, menyatakan kepada Dubes RI di Pretoria mengenai keinginan untuk mengembangkan kerja sama industri strategis dengan Indonesia, khususnya PT Pindad dan PT PAL. PG juga menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Indonesia pada awal tahun 2017.
29. Pada *Business-matchmaking* tanggal 9 Februari 2017, PT. PAL telah bertemu dengan *Denel Dynamic* sementara PT. Pindad bersama Indonesia Eximbank bertemu dengan *Denel Land System* (DLS). Pertemuan menghasilkan
 - *Denel Dynamic* menawarkan kerja sama penjualan dan instalasi peluru kendali pertahanan udara untuk kapal TNI Angkatan Laut RI. MoU kerja sama akan disampaikan kepada PT. PAL pada Maret 2017.
 - Minat Kepolisian Afsel untuk membeli pistol buatan PT. Pindad melalui kerja sama dengan DLS.

Kerja Sama Konsuler

30. Dalam rangka mendorong saling kunjung antara pejabat kedua negara disepakati untuk membentuk Persetujuan Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBV) antara RI dan Afsel. Proses pembahasan dan mekanisme internal di antara kedua negara memerlukan waktu beberapa tahun dan pada tanggal 8 Maret 2017, Menteri Luar Negeri RI dan Afsel menandatangani “Persetujuan antara Pemerintah Afrika Selatan dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas” (*Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the Republic of Indonesia on Visa Exemption for Holders of*

Diplomatic, Official, and Service Passports). Persetujuan dimaksud merupakan salah satu dari tiga dokumen yang disepakati oleh RI dan Afsel pada saat Kunjungan Kenegaraan Presiden Afsel, Jacob Zuma, ke Indonesia.

31. Pasal 10 (1) Persetujuan tersebut menyebutkan “Persetujuan ini wajib mulai berlaku tiga puluh (30) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir di mana Para Pihak saling memberitahukan Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini sebagaimana diatur dalam prosedur internal masing-masing telah terpenuhi”. Pemerintah Afsel telah menyampaikan nota diplomatik tertanggal 31 Maret 2017 mengenai kesiapan implementasi Persetujuan tersebut setelah menyelesaikan prosedur internalnya dan Pemerintah RI menyampaikan hal serupa melalui saluran diplomatik tertanggal 5 Juni 2017. Hal ini diikuti oleh tukar menukar spesimen paspor diplomatik dan paspor dinas/resmi oleh kedua negara. Atas dasar tersebut, Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas antara RI dan Afsel berlaku efektif mulai tanggal 6 Juli 2017.
32. Dalam rangka mendukung peningkatan pariwisata Indonesia dan mendorong interaksi *people-to-people*, melalui Perpres RI No. 69/2015, Indonesia telah memasukkan Afsel bersama dengan sejumlah negara-negara lain dalam daftar negara bebas visa kunjungan pada Juni 2015. Hal ini kembali ditegaskan melalui Perpres RI No. 21/2016 yang memberikan keleluasaan bagi WN Afsel pemegang paspor kebangsaan yang sah untuk melakukan kunjungan ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu (30 hari) dan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu (124 TPI).
33. Pemberian bebas visa kunjungan bagi WN Afsel diharapkan juga Pemerintah Afsel memberikan kemudahan kepada WN Indonesia untuk mendapatkan visa kunjungan baik wisata, usaha maupun sosbud ke Afsel yang selama ini masih memerlukan waktu lama.
34. Jumlah WNI yang menetap di Afsel tercatat sebanyak 242 orang (per Januari 2016). WNI di Afsel sebagian besar terdiri dari ibu rumah tangga yang menikah dengan WN Afsel berikut keluarganya dan sebagian yang lain adalah TKI yang bekerja di sektor jasa, termasuk dalam bidang telekomunikasi, pelayaran dan rohaniwan.
35. Mengingat Afsel memiliki dua pelabuhan besar yaitu Cape Town dan Durban yang menjadi tempat persinggahan kapal-kapal internasional, seringkali terjadi kasus yang melibatkan ABK WNI yang membutuhkan pelayanan dan bantuan dari KBRI Pretoria dan KJRI Cape Town. Permasalahan yang dialami oleh ABK WNI antara lain kasus kekerasan, pembayaran gaji maupun keimigrasian.

Kerja Sama Kepolisian

36. Pada November 2015, atas undangan Pemerintah Cape Town, Mabes Polri telah mengirimkan dua perwira Polri untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik masalah kepolisian di Indonesia dengan Kepolisian Metro Cape Town. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara kedua di Asia yang diundang untuk bekerja sama setelah Jepang pada program kerja sama tersebut.
37. Guna melanjutkan kerja sama antar kedua instansi kepolisian, Polri telah menyampaikan undangan kepada Kepolisian Metro Cape Town untuk mengikuti kursus penanganan

kejahatan dan *counter-terrorism* di *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JLEC) di Semarang, Jawa Tengah.

38. Pemri telah menyampaikan *counterdraft* MoU kerja sama Kepolisian RI-Afsel kepada pihak Afsel tanggal 23 Mei 2014 dan baru dibalas pada Maret 2017. MoU ini ditujukan untuk kerja sama menangani *money-laundering* dan pembiayaan terorisme.

VII. KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Indonesia-Africa Forum 2018

1. Guna identifikasi kerja sama konkret bisnis dan ekonomi Indonesia dengan kawasan Afrika Sub-Sahara, Kemlu c.q. Dit. Afrika akan menyelenggarakan *Indonesia-Africa Forum* pada Maret 2018. Forum dimaksudkan untuk membentuk *platform* diplomasi RI ke Afrika sekaligus memperkuat *engagement* Indonesia dengan kawasan. Forum direncanakan berlangsung setingkat menteri dengan mengundang 24 negara kunci di Afrika dan akan dibuka oleh Presiden RI.
2. Adapun agenda utama pembahasan kerja sama ekonomi dan *business matchmaking* antara pengusaha RI dengan kawasan. Forum direncanakan akan mengundang Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan dan wakil dari Uni Afrika sebagai pembicara.
3. Saat ini, usulan penyelenggaraan forum ini sedang dibahas dengan pihak Bappenas untuk dimasukkan dalam salah satu kegiatan Program Prioritas Nasional untuk pasar-pasar prospektif.

NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan REP.AFRIKA SELATAN
Periode: 2011 - 2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Trend(%) 2011-2015	Jan-Des		Perub.(%) 2016/2015
							2015	2016	
TOTAL PERDAGANGAN	2.142.367,4	2.353.483,9	1.895.266,1	1.877.999,2	898.066,7	-17,84	898.066,7	1.018.686,6	13,43
MIGAS	24.302,8	42.744,2	1.614,5	21.491,5	1.799,2	-44,53	1.799,2	1.350,4	-24,95
NON MIGAS	2.118.064,5	2.310.739,7	1.893.651,6	1.856.507,7	896.267,5	-17,63	896.267,5	1.017.336,2	13,51
EKSPOR	1.436.590,8	1.691.502,8	1.270.335,0	1.379.503,0	666.126,7	-15,98	666.126,7	727.880,0	9,27
MIGAS	22.700,5	41.203,7	251,0	422,2	502,7	-70,48	502,7	252,4	-49,80
NON MIGAS	1.413.890,3	1.650.299,0	1.270.084,0	1.379.080,9	665.624,0	-15,52	665.624,0	727.627,6	9,32
IMPOR	705.776,6	661.981,1	624.931,1	498.496,2	231.940,0	-22,19	231.940,0	290.806,6	25,38
MIGAS	1.602,4	1.540,4	1.363,5	21.069,3	1.296,5	24,51	1.296,5	1.098,0	-15,31
NON MIGAS	704.174,2	660.440,7	623.567,6	477.426,9	230.643,5	-22,56	230.643,5	289.708,6	25,61
NERACA PERDAGANGAN	730.814,2	1.029.521,7	645.403,9	881.006,8	434.186,6	-11,28	434.186,6	437.073,4	0,66
MIGAS	21.098,1	39.663,3	-1.112,5	-20.647,1	-793,8	0,00	-793,8	-845,6	-6,53
NON MIGAS	709.716,1	989.858,3	646.516,4	901.654,0	434.980,4	-10,17	434.980,4	437.919,0	0,68

4. Total nilai perdagangan RI-Afsel selama periode 2011-2015 turun rata-rata 17,84% per tahun. Pada tahun 2016, nilai perdagangan bilateral mencapai **USD 1,08 milyar**, naik

13,43% dibanding tahun 2015. Indonesia dalam 5 tahun terakhir menikmati surplus perdagangan terutama disebabkan produk-produk ekspor Indonesia seperti **CPO** dan **karet** yang cukup kompetitif di pasar Afsel.

5. Adapun produk ekspor utama RI ke Afsel adalah furnitur (dikenakan tarif 20%), produk makanan dan minuman (tarif 20%), sepatu (tarif 30%), pakaian jadi (40%), ban (tarif 30%) dan kelapa sawit (tarif 10%). Tingginya tarif ini mendorong Indonesia perlu melakukan perundingan dengan Afsel untuk penurunan tarif/bea masuk. Sementara impor utama RI dari Afsel adalah bubur kertas, emas, buah-buahan, besi dan tembaga.
6. Pada beberapa kunjungan dan pertemuan pejabat tinggi kedua negara, termasuk kunjungan Wamenlu ke Cape Town, Februari 2016, teridentifikasi sejumlah tantangan perdagangan yang perlu diatasi. Termasuk dalam hal ini yaitu besarnya pajak impor bagi produk Indonesia (20%) yang turut dikenakan PPN (14%), ketidakpastian *supply* dalam jumlah besar, kesulitan pembukaan rekening di Indonesia dan pembayaran transaksi bagi para importir dan lamanya proses pengiriman produk impor dari Indonesia. Selain itu, pihak KADIN juga mengusulkan pembukaan jalur penerbangan langsung untuk mempermudah hubungan B to B kedua negara yang mana hal ini sulit dipenuhi oleh kedua pihak.
7. Menlu RI menghadiri Forum Bisnis RI-Afsel di Cape Town, tanggal 6 Februari 2017. Forum Bisnis dihadiri oleh perusahaan RI dari PT PAL, PT Pindad, Ketua Kadin Komite Afrika, dan Indonesia Eximbank. Dalam sambutan, Menlu antara lain menyampaikan berbagai keunggulan RI, salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia tenggara, dan stabilitas politik RI.
8. Menlu dalam kesempatan pertemuan bilateral dengan Menlu Afsel di Cape Town, 6 Februari 2017, menyampaikan bahwa salah satu hambatan perdagangan kedua negara adalah masih tingginya tarif impor yang diberlakukan Afsel untuk produk barang jadi dengan rata-rata di atas 25%. Sementara Indonesia hanya memberikan 5 (lima) persen bagi 11 macam buah dari Afsel. Menlu menyampaikan kesiapan Indonesia iuntuk memulai pembahasan dan identifikasi tarif yang dapat dikurangi.
9. Sementara pada kunjungan kehormatan kepada Presiden Afsel, antara lain Menlu RI sampaikan bahwa terdapat tantangan bagi produk Indonesia ke Afsel, salah satunya tingginya tarif masuk. Indonesia siap untuk memulai pembahasan PTA RI-SACU dan mengidentifikasi tariff yang akan dikurangi.
10. Pada Forum Bisnis RI-Afsel di Cape Town, 6 Februari 2017 dan *Busines Match-making* di Johannesburg RI-Afsel, 9 Februari 2017 , dihasilkan:
 - a. Forum Bisnis RI-Afsel dihadiri oleh perusahaan RI dari PT PAL, PT Pindad, Ketua Kadin Komite Afrika, dan Indonesia Eximbank. Sementara Afsel diwakli oleh KADIN Cape Town, Denel System, PT Paramount Group dan Rautech, dan importir furniture dan Indomie. Hasil Forum Bisnis, antara lain:
 - Penjajakan rencana pendirian pabrik produksi Indomie di Afsel. Saat ini tengah dipenuhi permintaan pembelian 11 kontainer Indomie dari Indonesia. Pihak Indonesia ingin terlebih dahulu melihat seberapa banyak Indomie yang dapat dijual.

- Penjajakan awal kerja sama PT PAL Indonesia dan PT Pindad dengan *Denel Land System*, dan dengan dua perusahaan swasta industri strategis Afsel, PT Paramount Group dan Rauetch.
- b. Pada hari yang sama, juga terdapat pertemuan Ketua Kadin RI Komite Afrika dengan *South African Chamber of Commerce and Industry* (SACCI), Direktur Bilateral Asia Kemendag dan investasi Afsel serta CEO *Advance Cash & Carry*, importir utama Indofood. Selain persiapan terkait IORA *Business Forum*, juga dibahas hal-hal sebagai berikut:
- Terdapat kendala *non-tariff barrier* terkait dengan pengemasan bagi produk Indofood yang dinilai belum memenuhi standar Afsel sehingga tertahan cukup lama di bea cukai.
 - Minat CEO *Advance Cash & Carry* untuk impor *soap noodles*.
 - Menanyakan usulan Indonesia untuk pelaksanaan *Senior Official Meeting JTC ke-3* di Pretoria.
11. Kerjasama ekonomi RI-Afsel juga ditandai dengan meningkatnya intensitas pengiriman misi ekonomi dari Afsel ke Indonesia dan sebaliknya. Pengusaha Afsel aktif berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI). Pada tahun 2015 terdapat 21 orang yang mengikuti TEI 2015, dan pada 2016 terdapat kontrak pembelian produk kabel Indonesia senilai USD 5,1 juta dan juga produk Indofood senilai USD 220.000. Sebaliknya delegasi bisnis Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai pameran di Afsel seperti pameran *Africa Big Seven*, Saitex, Getaway dan Decorex.
12. Indonesia dan Afsel telah memiliki mekanisme *Joint Trade Committee* (JTC) yang dibentuk pada tahun 2005. Pada JTC ke-2 di Jakarta tahun 2012 yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan kedua negara, kedua pihak sepakat mengenai pentingnya pembentukan *Preferensial Trade Agreement* (PTA) RI-Afsel. Namun dalam perkembangannya, Afsel menyampaikan kesulitan untuk pembentukan PTA tersebut, mengingat Afsel adalah anggota *Southern African Customs Union* (SACU), terdiri dari Afsel, Botswana, Namibia, Lesotho, dan Swaziland.
13. Sebagai tindak lanjut JTC ke-2, kedua pemerintah sempat menyusun *complementary study* untuk menjajaki kemungkinan PTA RI-Afsel. Namun, mengingat alasan di atas, Kemendag RI akhirnya menghentikan proses studi tersebut dan saat ini sedang menyusun *briefing paper* PTA RI-SACU.
14. Sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar di kawasan masing-masing, serta mempertimbangkan besarnya potensi produk-produk perdagangan yang bersifat komplementer, Afsel diharapkan menjadi *gateway* bagi masuknya produk dan jasa dari Indonesia ke wilayah SADC, berpenduduk sekitar **300 juta**. Sebaiknya, Afsel melihat Indonesia sebagai pasar besar dan sebagai *entry point* bagi masuknya produk dan jasa dari Afsel ke dalam pasar ASEAN. Indonesia perlu terus menjajaki dan mendorong pembentukan PTA RI-SACU tersebut. Hal ini direncanakan akan dibahas pada penyelenggaraan JTC ke-3.
15. Kedua negara telah menyelenggarakan *Joint Trade Committee* ke-3 RI-Afsel tingkat Pejabat Senior pada tanggal 4-5 Mei 2017 di Pretoria. Pertemuan ini merupakan persiapan bagi pertemuan JTC ke-3 pada tingkat Menteri Perdagangan yang dijadwalkan pada tanggal 21 Juli 2017.

16. Di bidang investasi, Afsel telah mulai melakukan ekspansi ke Indonesia dengan nilai investasi senilai USD 1,2 juta pada tahun 2011, kemudian USD 500 ribu pada tahun 2014, USD 100 ribu pada 2015, dan USD 1 juta di tahun 2016. Jadi total investasi Afsel selama 6 tahun sebesar **USD 2,8 juta**.
17. Di bidang perhubungan udara, RI-Afsel telah menandatangani *Bilateral Air Transportation Agreement* pada 20 November 1997 yang masih berlaku hingga kini. Melalui pertemuan *ICAO Air Service Negotiation* di Durban, Afsel, 9-14 Desember 2013 telah Dubai/Abu Dhabi ditetapkan sebagai *immediate point* bagi maskapai Afsel. RI telah menunjuk *Garuda Air* dan Afsel telah menunjuk *South African Airways (SAA)* sebagai *designated airlines* masing-masing negara. Sejak Oktober 2014, *South African Airways* telah melakukan kerjasama *codeshare* dengan *Etihad Airways* sebagai tahap awal penerbangan ke Indonesia.
18. Di bidang kerja sama UKM, RI-Afsel telah menandatangani *MoU* kerja sama Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara Kementerian KUKM dan *Small Enterprise Development Agency* dan *MoU* kerja sama KUKM antara Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (LLP-KUKM) dengan NAFCO (Kadin Afsel) bulan November 2012. Namun hingga saat ini belum terdapat kerja sama yang terealisasi.
19. Di bidang kerja sama *Special Economic Zones, Batam Industrial Free Zone Authority (BIFZA)* saat ini tengah memproses *MoU* kerja sama SEZ dengan COEGA Industrial Development Zone. Pihak COEGA menginginkan agar *Declaration of Intent* yang telah ditandatangani tahun 2008 dapat ditingkatkan menjadi *MoU*. BIFZA juga sedang memfinalisasi *MoU* kerjasama SEZ dengan Kementerian Perdagangan dan Industri Afsel dalam rangka membantu pembangunan 10 SEZ di wilayah Afsel. Namun sejak pergantian kepemimpinan BIFZA yang baru pada 2016, penyelesaian kerja sama SEZ dengan Kementerian Perdagangan dan Industri Afsel sedang mengalami *review*.
20. Kedua negara juga memiliki potensi kuat dalam bidang kerja sama energi. Pada kesempatan pertemuan bilateral Wapres RI dengan Wapres Afsel, Cyril Ramaphosa di sela-sela KTT AA ke-60 di Jakarta, 23 April 2015, Wapres RI menyambut baik keinginan pihak Afsel untuk menjalin kerja sama energi, termasuk energi terbarukan seperti energi nuklir.

Kerja Sama Pertanian

21. Berdasarkan *MoU* Kerja Sama Pertanian yang ditandatangani 19 April 2005, kedua negara sepakat untuk membentuk mekanisme *Joint Agricultural Cooperation Committee (JACC)*. TOR JACC yang diusulkan oleh Afsel pada prinsipnya telah disetujui oleh Kemtan RI sehingga siap ditandatangani dan diselenggarakan JACC pertama.
22. Kebijakan pemberlakuan karantina oleh Indonesia terhadap impor produk *exotic organism* pada 2012, telah memberatkan pengusaha ekspor buah Afsel. Pemerintah Afsel pada 19 September 2012 mengajukan aplikasi pengakuan (*recognition*) atas Sistem Kontrol Keamanan Makanan (*Food Safety Control System*) kepada Pemerintah RI (c.q. Badan Karantina Kemtan RI/Barantan) bagi sekitar 26 jenis komoditas pangan (seperti buah, jagung, dan lain-lain) agar tidak mengalami kesulitan masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

23. Pihak Afsel mengharapkan RI bersikap fleksibel dan Afsel bersedia memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana disampaikan oleh Mendag Afsel melalui surat kepada Mendag RI tanggal 6 Agustus 2015. Menteri Perdagangan Afsel menyampaikan bahwa meskipun WTO pada tanggal 20 Mei 2015 membentuk *dispute settlement panel* terhadap isu produk-produk ekspor pertanian ke Indonesia, Afsel tidak mengikuti pendekatan tersebut, namun tetap mengharapkan penyelesaian bilateral (*amicable*) dengan tetap mengharapkan dukungan dan kerjasama dengan Kemtan dan Kemdag RI.
24. Sebagai tanggapan atas permintaan Afsel, Tim Evaluasi Badan Karantina melakukan verifikasi Sistem Kontrol Keamanan Makanan (*Food Safety Control System*) melalui kunjungan lapangan ke Afsel pada 23-28 Agustus 2015. Hasil kunjungan diperoleh rekomendasi untuk pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan Afsel dengan diterbitkannya:
- a. SK Mentan RI nomor 141/KPTS/KR.040/L/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang “Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afsel”, yang memberikan kewenangan kepada 4 (empat) laboratorium Afsel untuk menerbitkan Sertifikat Hasil Uji (Certificate of Analysis) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari Afsel yang diekspor ke Indonesia. SK ini juga mengatur 8 komoditi yang terdaftar sebagai Fresh Food of Plant Origin Safety Testing Laboratories of South Africa, diantaranya kiwi, plum, sitrus, leci, alpukat, anggur dan lain-lain.
 - b. SK Mentan RI nomor: 234/KPTS/KR.050/4/2016 tanggal 11 April 2016, tentang “Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afsel”. Melalui SK ini, Pemri secara resmi telah memberi pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT Afsel untuk 15 (lima belas) jenis produk buah diantaranya anggur, apel, aprokit, jeruk, pear, kacang, dan lain-lain.
25. Sebagai tindak lanjut dari pengakuan *food safety control system* atas produk pertanian Afsel, pada 2-5 Mei 2016, Delegasi Asosiasi Industri Buah Afsel mengadakan kunjungan ke Indonesia. Dalam pertemuan dengan Badan Karantina Kementerian Pertanian RI, tanggal 4 Mei 2016, telah ditandatangani *Agreed Minutes* prosedur penerapan pemberlakuan SK Mentan No. 234 Tahun 2016 dan SK Mentan No. 141 tahun 2016. Pada *Agreed Minutes* tersebut juga disepakati penggunaan laboratorium di Afsel bagi negara-negara Afrika lainnya untuk mendapatkan sertifikasi dalam mengekspor produk pertaniannya ke Indonesia.
26. Dengan terdapatnya pengakuan *food safety control system* atas produk pertanian Afsel, pertemuan Delegasi Asosiasi Industri Buah Afsel dan Delegasi Kementerian Pertanian RI juga sepakat untuk mendorong penyelenggaraan *Joint Agricultural Cooperation Committee*.

Impor Daging Afsel

27. Perusahaan peternakan dan eksportir sapi Afsel telah menyampaikan keinginan untuk menjajaki pasar sapi di Indonesia. KBRI Pretoria melaporkan bahwa sapi yang akan dipasarkan ke Indonesia adalah jenis Bahman dengan harga USD 3,10 per kg. Sapi tersebut telah memiliki sertifikat bebas penyakit mulut dan kuku dengan kualitas daging

yang sangat baik. Perusahaan Afsel tersebut, Doornkop Farms”, telah mendapatkan sertifikasi halal dari otoritas setempat. Adapun harga jual daging Afsel setelah memasuki pasar Indonesia sekitar Rp 50.000 per kg.

28. Berdasarkan kordinasi dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Indonesia telah membuka untuk impor daging sepanjang negara eksportir tersebut telah memenuhi persyaratan. Hal ini sejalan dengan Paket Ekonomi Ke-9 Presiden RI yang bertujuan untuk menurunkan harga daging ke sekitar Rp. 80.000/kg
29. Sebagai tahap awal kualifikasi impor, Afsel telah memenuhi permintaan informasi oleh Kemtan RI terkait karantina dan sanitasi komoditas ternak lokal Afsel pada 29 Januari 2016.
30. Dalam perkembangannya, Kemtan c.q. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada 20 Oktober 2016 menyampaikan bahwa impor daging dari Afsel belum dapat memasuki pasar Indonesia kecuali pada saat krisis daging karena wabah atau bencana alam di Indonesia.
31. Hal ini karena Afsel masih termasuk daftar negara *undetermined Bovine Spongiform Encephalopathy* dari *World Organization for Animal Health*. Status tersebut berarti masih terdapat resiko penyakit Sapi Gila yang belum dapat ditentukan di negara tersebut. Impor daging Afsel ke Indonesia baru dapat dilakukan segera setelah Afsel menyelesaikan isu penyakit Sapi Gila di negara tersebut.

Kerja Sama Kelautan dan Perikanan

32. Sidang SKB I RI-Afsel di Batam tahun 2008 menegaskan pentingnya mengembangkan kerja sama perikanan. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri RI telah menyampaikan counter-draft *MoU Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on Marine and Fisheries Cooperation* pada 17 Maret 2016.
33. Pada 19 Agustus 2016, KBRI Pretoria telah menanyakan perihal finalisasi dan kemungkinan penandatanganan MoU tersebut ke Kemlu Afsel. Namun hingga saat ini belum terdapat tanggapan.
34. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melihat bahwa Afsel memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk produk perikanan RI ke Afrika.

Kerja Sama Pariwisata

35. Kerja sama pariwisata Indonesia dan Afsel terus menunjukkan kemajuan, meskipun belum maksimal. Pada Juni 2015 Pemerintah Indonesia telah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat bagi WN Afsel yang akan melakukan perjalanan wisata ke Indonesia.
36. Pada 20 Agustus 2015, Wamenpar Afsel Ms. Tokozile Xasa telah melakukan kunjungan ke Indonesia dan diterima oleh Menteri Pariwisata RI Arief Yahya di Jakarta. Kedua pihak menyepakati 3 (tiga) area kerja sama dan kemitraan di sektor pariwisata yaitu: (i) kerja sama *digital marketing and promotion* pariwisata; (ii) pertukaran informasi dan kerja sama pendidikan/pelatihan kepariwisataan. Indonesia dalam hal ini telah

memiliki 4 (empat) perguruan tinggi khusus pariwisata yang memiliki standar internasional, sementara Afsel juga memiliki sekolah perhotelan; (iii) fasilitasi kemudahan visa wisata.

37. Menanggapi permintaan Menpar RI agar Pemerintah Afsel secara resiprokal dapat memberikan fasilitasi bebas visa bagi wisatawan Indonesia, Wamenpar Afsel menyampaikan bahwa secara internal Pemerintah Afsel di bawah koordinasi langsung dari Wakil Presiden saat ini sedang melakukan *review* rezim visa secara menyeluruh di Afsel. Pembebasan visa wisata bagi warga Indonesia menurut Wamenpar Afsel akan mendapatkan pertimbangan khusus.
38. Kunjungan wisatawan Afsel ke Indonesia pada tahun 2015 mencapai 25.048 orang, meningkat dibandingkan tahun 2014 mencapai 16.811 orang. Sementara itu, sesuai dengan data Afsel, kunjungan wisatawan Indonesia ke Afsel selama 4 tahun terakhir yaitu 2.040 orang (2015), 3.102 orang (2014), 6.254 orang (2013) dan 6.113 orang (2012).

VIII. KERJA SAMA SOSIAL BUDAYA

1. Dalam catatan sejarah, hubungan kedua bangsa sudah terjalin sejak tiga abad lampau ketika tokoh ulama dan pejuang anti kolonialisme Belanda asal Makassar bernama Syeikh Yusuf (1626 - Mei 1699) diasingkan ke Cape Town. Syeikh Yusuf yang oleh Pemerintah Indonesia dan Afsel diakui sebagai Pahlawan Nasional, berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan pembentukan komunitas Melayu atau *Cape Malay* di Afsel. Hingga saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 800 ribu s.d. 1,2 juta warga Cape Malay di seluruh Afsel dan sejumlah makam ulama asal Indonesia yang diasingkan di Cape Town.
2. Komunitas keturunan Indonesia di Cape Malay tersebut telah mengirimkan delegasi ke Indonesia pada Desember 2015 guna menjalin hubungan erat dan mempromosikan *people to people contact* antara RI-Afsel. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama dengan insititut pendidikan Islam di Indonesia berupa penandatanganan MoU pertukaran pelajar, akademik dan kerja sama penelitian.
3. Tercatat juga kunjungan salah satu pejuang kemerdekaan Afsel, Autshumao, kepala salah satu suku pribumi Afsel pada tahun 1630-an yang berlayar melalui perahu kargo Inggris dari Tanjung Harapan ke Banten di Pulau Jawa. Autshumao akhirnya dipenjara di Pulau Robben. Selain itu terdapat juga tokoh-tokoh seperti Susanna dan Catherine dari Paliacatt yang diasingkan dari Jakarta ke Pulau Roben pada tahun 1657.
4. Pada 18 April 2016, delegasi Cape Malay yang dipimpin oleh mantan Dubes Afsel untuk Amerika Serikat, Ebrahim Rasool, telah bertemu dengan Wapres RI di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, delegasi menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama antara Diaspora Indonesia Cape Malay dan Indonesia. Juga disampaikan permohonan bantuan untuk pendirian *Syeikh Yusuf Graduate School of Studies* dan *Syeikh Yusuf Endowment Fund* yang disambut positif oleh Wapres RI.
5. Guna memperkuat kerja sama dan ikatan sosial budaya, Wamenlu RI dalam kunjungannya ke Cape Town, Februari 2016, telah melakukan pertemuan dengan para

tokoh komunitas Cape Malay dan mengunjungi Makam Sheikh Yusuf serta Mesjid komunitas diaspora Indonesia di Cape Town.

6. RI-Afsel telah menandatangani *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on Cultural Co-operation* pada tanggal 17 Maret 2008. Diakui bahwa hingga kini belum banyak kemajuan sebagai upaya implementasi MoU tersebut.
7. RI-Afsel juga telah menandatangani *arrangement* kerja sama penerbitan prangko bersama (*Joint Issue of Stamps*) pada tahun 2011 di Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan *launching* prangko seri bersama di Cape Town, Afsel pada tanggal 15 Oktober 2011.
8. Presiden SBY dalam pertemuan dengan masyarakat Cape Malay (keturunan Indonesia) di Cape Town Maret 2008, berkomitmen untuk hibahkan perpustakaan berbentuk rumah adat Makassar “Balla Lompoa” sebagai pusat informasi mengenai Indonesia, khususnya mengenai Syekh Yusuf.
9. Pada tahun 2010 Pemri telah menyampaikan Draft MoU mengenai pemberian hibah perpustakaan dimaksud kepada pihak Afsel. Namun hingga saat ini pihak Afsel belum memberikan persetujuan bahkan tanggapan resmi atas draft MoU tersebut. Pihak Afsel tampaknya mengalami kesulitan terkait dengan biaya pemeliharaan dan operasionalisasi serta koordinasi antar otoritas yang akan bertanggungjawab atas perpustakaan tersebut. Juga terdapat kesan keengganan dari kalangan tertentu di Afsel atas proyek budaya tersebut, karena dikhawatirkan dapat menambah kompleksitas penanganan *diversity* di Afsel yang merupakan masyarakat plural. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pemri pada saat ini tidak mendesakkan realisasi proyek hibah Balla Lompoa dimaksud kepada pihak Afsel.
10. Sebagai wujud komitmen mantan Presiden Afsel, Thabo Mbeki yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika berkunjung ke Afsel pada 2008, Pemerintah Afsel melalui Kedubesnya di Jakarta pada 16 April 2010 telah menyerahkan secara simbolis kepada Kemlu RI c.q. Dirjen Aspasaf bantuan sebesar USD 1 juta.
11. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pembangunan Pusat Pelatihan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Banda Aceh, khususnya dalam rangka proses rekonstruksi dan pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat Aceh pasca Tsunami 2004. Saat ini proyek tersebut sedang direalisasikan (proses pembangunan 30% per September 2015).

Kerja Sama Pendidikan dan Ristek

12. Di bidang pendidikan, kerja sama RI-Afsel terjalin melalui pemberian Beasiswa Darmasiswa, Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang dan Beasiswa Kementerian Agama. Selama periode 2007-2014, sekitar 50 mahasiswa Afsel tercatat sebagai penerima beasiswa tersebut.

Kerja Sama Pelatihan Diplomatik

13. Kemlu RI dan Afsel sepakat untuk membentuk MoU Kerja Sama Pelatihan Diplomatik. *Draft* MoU tersebut pernah disiapkan untuk ditandatangani oleh kedua Menlu pada kesempatan kunjungan Menlu Afsel ke Indonesia, Maret 2014, namun tertunda. Pemri telah mengusulkan kembali kepada pihak Afsel agar MoU tersebut dapat ditandatangani pada kesempatan *State Visit* Presiden Afsel, 19-21 April 2015, namun belum juga terlaksana.
14. Pusdiklat kembali menyampaikan draft MoU pada 30 Januari 2016 yang kemudian ditanggapi oleh *counterdraft* oleh pihak Afsel pada 17 Februari 2017 yang intinya menyetujui usulan *draft* Indonesia. MoU direncanakan akan ditandatangani pada kunjungan kenegaraan Presiden Zuma pada 8 Maret 2017.

Kerja Sama Pengkajian Kebijakan Luar Negeri

15. Kedua negara telah menandatangani MoU Kerja Sama Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Bersama antara kedua Kemlu pada 1 Maret 2014. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak telah tiga kali menyelenggarakan *Policy Research Consultation* (PRC), yang terakhir dilaksanakan di Pretoria, 21 September 2015.
16. Sementara the 4th PRC RI-Afsel rencananya akan dilaksanakan di Bandung, November 2016. Hingga saat ini, Kemlu Afsel belum memberikan tanggapan/masukan mengenai tanggal penyelenggaraan the 4th PRC.

Kerja Sama Kesehatan

17. Pasar farmasi Afsel merupakan yang terbesar di Afrika Sub-Sahara dengan total estimasi *market size* sebesar USD 3,9 miliar pada tahun 2013 dan tingkat pertumbuhan sebesar 6% per tahun (*Deloitte*, 2015). Afsel juga memiliki basis manufaktur yang paling maju di kawasan, dengan beberapa perusahaan *life sciences* Afsel yang terkenal seperti *Aspen*, *Adcock Ingram* dan *Genius Biotherapeutics*.
18. Guna mendukung perkembangan industri *life Sciences*, Pemerintah Afsel telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Termasuk dalam hal ini, proyek Kettaphela untuk memproduksi bahan baku obat pada tahun 2017, pembentukan peraturan paten yang terintegrasi dan peraturan untuk menjadikan sebagai destinasi menarik bagi uji klinis produk kesehatan. Pemerintah Afsel juga mendorong produksi obat generik, khususnya bagi obat anti-retroviral untuk menangani wabah AIDS di negara tersebut.
19. Sebagai sesama *emerging countries* dalam industri *life sciences* dan bioteknologi, kiranya Pemri dapat menjajaki kerja sama di bidang tersebut. Hal ini mengingat pengembangan *life science industry* di bidang kesehatan sangat terkait erat dengan aspek riset dan inovasi, yang memerlukan banyak faktor pendukung, seperti sumber luar negeri. Dalam hal perlindungan *intellectual property* (IP) termasuk dalam industri kesehatan, peringkat Afsel lebih baik dari Indonesia menurut *US Chamber International IP Index*.
20. Saat ini sudah ada kesediaan kerja sama antara Indonesia dengan antara lain Iran, Tunisia dan IDB (khusus untuk *pengembangan* menjadi center of excellence OKI). Sementara dengan Afrika Selatan, PT. Bio Farma mencatat penjualan vaksin sebesar USD 0,65 juta ke negara tersebut dalam periode 2001-2015

21. Kunjungan Delegasi Kemenristek Afsel dipimpin oleh *Chief Director Overseas Bilateral, Department of Science and Technology* Afrika Selatan, Dr. Neville Arendse ke Indonesia tanggal 18 November 2016, dan diterima oleh Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, Nada Marsudi. Pada pertemuan tersebut membahas, a.l.:

- kerja sama pertukaran tenaga ahli (*sharing experience/expertise*).
- perkembangan proyek kerja sama di sektor *aloe vera*, dan usulan proyek kerja sama baru, seperti inovasi kesehatan, *biotechnology*, *bio resources*, *human vaccines* dan *animal vaccines*.
- usulan pembaruan MoU kerja sama (ditandatangani pada 2005)
- undangan dari Menteri *Department Science and Technology* Afsel kepada Menristekdikti RI untuk berkunjung ke Afsel.

22. Saat ini sedang terdapat koordinasi antara Kemlu, Kemkumham, Kemkes dan Badan POM untuk mulai membuat kebijakan terintegrasi industri kesehatan (*life science industries*) Indonesia dengan melihat *best practices* dari negara mapan (AS) dan *emerging countries* seperti India, Afsel dan RRT.

23. Nilai industri *life sciences industries* Indonesia baru pada nilai USD 3 milyar dengan keuntungan lebih banyak diperoleh negara lain melalui ekspor ke Indonesia.

Kerja Sama Teknik (*Capacity Building*)

24. Di bidang kerja sama teknik, pada periode 2006-2014, sebanyak 22 orang peserta Afsel telah mengikuti sejumlah pelatihan yang diselenggarakan RI antara lain di bidang SMEs (2006), *microfinance* (2008), *good governance* (2012), pendidikan diplomat (Sesdilu Internasional tahun 2012) dan pertanian (*water management* tahun 2013).

25. Pada pertemuan Wamenlu RI dengan Ketua Parlemen serta Ketua Dewan Pengurus ANC Western Cape di Cape Town, Februari 2016, Dewan Western Cape mengharapkan bantuan peningkatan kapasitas di bidang pengembangan UKM dan pemberdayaan wanita. Wamenlu RI menanggapi positif permintaan tersebut dengan merujuk adanya MoU UKM RI-Afsel sebagai payung pengaturan kerja sama ke depan

Kerja Sama *Sister City / Province*

26. Indonesia dan Afsel mempunyai beberapa program kerja sama *sister province* dan *sister city* yang sedang dibahas antara lain *Sister Province* antara Western Cape dan Sulawesi Selatan, *Sister Province* antara Eastern Cape dan Kepulauan Riau, *Sister City* antara Cape Town dan Jakarta, *Sister City* antara Port Elizabeth dan Cirebon serta *Sister City* Cape Town dan Makassar.

27. Terkait *sister city* makassar dengan Cape Town, Pemkot Makassar telah menyampaikan draf awal LoI Kerja Sama *Sister City* kepada KJRI Cape Town pada Desember 2016. Sementara MoU *sister province* antara *Western Cape* dan Sulsel telah berakhir masa berlakunya sejak 2010.